

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokratis, yang dimana berarti pemerintahan berada ditangan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Selain itu Ganjar M.,dkk (2008: 108) mengatakan,

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan sekaligus diperintah. Pemerintahan dalam negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, serta mempertanggungjawabkan pada rakyat.

Jadi, maksudnya disini rakyat bisa memilih langsung pemimpin yang bisa mewakilinya untuk menjalankan pemerintahan di negaranya.

Adapun untuk di Indonesia sendiri mulai dari PEMILU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 sudah mulai dipilih langsung oleh rakyat, tanpa harus diwakilkan pada anggota legislatif (DPR). Selain itu juga mulai dari tahun 2005 tidak hanya Presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya, akan tetapi mulai dari anggota DPR, Gubernur, Wali kota/Bupati, dan sebagainya sudah mulai dipilih langsung oleh rakyat.

Untuk PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) sendiri merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung, yang diselenggarakan di Inonesia ini. Yang dimana PEMILUKADA ini bisa dikatakan salah satu bentuk dari pesta demokrasi. Sekarang ini setiap daerah di Indonesia ini, pasti dalam memilih kepala daerahnya melakukan pemilihan secara langsung.

Dimana masyarakat bisa menentukan sendiri siapa pemimpin yang berhak untuk memimpin daerahnya tersebut. Dengan PEMILUKADA langsung ini berarti adanya partisipasi politik langsung dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana Sudijono Sastroatmodjo (1995: 67) katakan “bahwa partsipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik”. Maka dari itu adanya PEMILUKADA ini bisa

membantu proses modernisasi politik di Negara kita. Sehingga nantinya demokrasi yang sebenarnya pun perlahan-lahan akan bisa terwujud.

Selain itu juga menurut Djoko Suyanto (2012: 25) mengatakan,

Pemilukada sebagai agenda permanen dalam tata pemerintahan kita yang menjadi penentu keberhasilan demokrasi di daerah, sekaligus penentu kualitas sosok kepala daerah, perlu dijaga agar terhindar dari fenomena-fenomena yang merugikan kepentingan bersama. Semua pihak perlu memiliki kedewasaan dan pikiran jernih, untuk memandang dan mewujudkan demokrasi sebagai jalan menuju kemaslahatan umum dan kesejahteraan rakyat.

Jadi, disini harus lah ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi di daerah terutama dalam hal berpartisipasi politik agar nantinya modernisasi politik yang diharapkan bisa terwujud sepenuhnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan PEMILUKADA ini tidak lah selalu berjalan dengan mulus, selalu saja ada tantangan yang meghadapang, yang dimana hampir semua pelaksanaan PEMILUKADA yang pernah terjadi, selalu saja ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti adanya calon kepala daerah yang tidak layak, adanya politik uang (*money politic*), kampanye terselubung, warga masyarakat yang apatis, kurangnya sosialisasi politik, kaum elit yang mendominasi, tidak diberi kesempatannya kaum muda untuk memimpin, dan masih banyak lagi. Hal tersebutlah yang nantinya akan menghambat proses demokrasi di daerah.

Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut haruslah dibenahi, karena apabila dibiarkan terus-menerus akan membuat proses moderenisai politik ini terhambat. Selain itu juga akan melahirkan sikap ketidak percayaan dari rakyat kepada pemimpinnya.

Untuk membenahi hal tersebut bisa kita mulai dengan cara mensosialisaaikan kegiatan PEMILUKADA ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang terisolir. Akan tetapi dalam mensosilisaikan kegiatan PEMILUKADA ini tidak lah hanya kepada orang-orang dewasa saja. Tetapi generasi muda pun perlu diberikan pengarahan atau sosialisai kegiatan PEMILUKADA, terutama dalam hal berpartisipasi politik. Karena nantinya mereka merupakan generasi penerus dari orang-orang dewasa yang ada

sekarang ini. Nanti mereka pun pasti akan berpartisipasi politik secara langsung. Jangan sampai ketika tiba waktunya mereka berpartisipasi politik, mereka malah tidak mengerti apa itu partisipasi politik yang sebenarnya. Sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman pada mereka.

Contohnya saja sekarang ini sudah mulai banyak generasi muda yang tidak respek dengan kegiatan politik sederhana yang ada dilingkungan sekitarnya. Bahkan ada generasi muda atau remaja yang sudah memiliki hak pilih dalam kegiatan PEMILUKADA atau semacamnya tidak memnggunakan haknya tersebut atau sering kita sebut dengan nama “Golput”. Jadi mereka ini tidak tertarik dengan hal-hal tersebut, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan urusan orang tua atau orang-orang dewasa. Bahkan ada juga yang kecewa dengan Pemilukada-Pemilukada sebelumnya dikarenakan sering terjadinya kecurangan atau manipulasi dalam kegiatan tersebut.

Hal tersebut terbukti dengan menurunnya jumlah pemilih pemula dalam setiap kegiatan Pemilu. Sebagaimana yang dikatakan Direktur Eksekutif the Political Literacy Institute (Policy) yaitu Gun Gun Heryanto “Berdasarkan banyak hasil survei yang kami lakukan, tingkat kepercayaan generasi muda terhadap politik cenderung terus menurun. Penurunannya mencapai 10%. Itu karena pendidikan politik yang sangat kurang dilakukan oleh politisi,” (lihat, INILAH.COM, Kamis 5 Januari 2012).

Bila melihat kenyataan tersebut agaknya kita perlu mawas diri, terutama pemerintah dan lembaga-lembaga sosialisasi politik lainnya. Hal tersebut bisa terjadi yang diakibatkan dari kesalahan pemerintah dan lembaga-lembaga sosialisasi politik sendiri yang kurang memberikan pengertian mengenai masalah partisipasi politik yang ada di negara kita. Atau hal tersebut bisa terjadi karena kaum muda melihat bahwa kegiatan politik di negara kita sekarang ini banyak yang melakukan *money politic* atau pun *politic transaksional*.

Dengan adanya hal seperti itu membuat mereka tidak simpati dengan kegiatan politik yang ada. Selain itu juga hal tersebut di perparah dengan kurangnya pendidikan politik yang diberikan partai politik atau pun lembaga yang terkait sehubungan dengan kegiatan politik tersebut. Karena setahu kita, para kaum muda

mendapatkan pendidikan politik ini dari sekolah dan itu pun tidak dijelaskan secara rinci, sehingga hal tersebut kurang efektif untuk memberikan penjelasan kepada kaum muda ini mengenai masalah politik yang terjadi.

Maka dari itu peranan pemerintah, partai politik, sekolah dan lembaga yang terkait sangatlah dibutuhkan dalam memberikan pendidikan politik pada kaum muda sekarang ini. Terutama dalam masalah partisipasi politik, karena apabila hal tersebut terus dibiarkan maka persepsi yang salah mengenai kegiatan politik pun akan terus terjadi dan sikap apatis yang ditunjukkan kaum muda sekarang ini pada kegiatan politik pun akan semakin parah saja. Dan sistem demokrasi yang negara kita anut sekarang ini pun tidak akan berhasil.

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang akan menjadi fokus permasalahan secara umum. Masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana Persepsi Siswa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Cimahi?”

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membatasi ruang lingkup kajian permasalahannya dengan merumuskan sub pokoknya yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian siswa mengenai figur calon Wali Kota Cimahi pada saat pemilihan?
2. Bagaimana penilaian siswa terhadap Wali Kota Cimahi yang terpilih?
3. Bagaimana persepsi siswa mengenai pelaksanaan kampanye PEMILUKADA Kota Cimahi?
4. Bagaimana pemahaman siswa dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung di Kota Cimahi?
5. Apa harapan siswa mengenai penyelenggaraan PEMILUKADA Kota Cimahi?

Adapun yang indikator dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Figur Kepala Daerah:

- Berintelektual
- Objektif
- Memiliki popularitas
- Amanah
- Berintegritas
- Katalistis
- Berdedikasi

b. Kegiatan kampanye di PEMILUKADA :

- Pelaksanaan kegiatan kampanye
- Mengikuti perkembangan kampanye
- Partisipasi dalam kegiatan kampanye

c. Pemahaman siswa dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung di Kota Cimahi:

- Mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan PEMILUKADA
- Ikut serta dalam pelaksanaan PEMILUKADA
- Adanya pertimbangan hati nurani
- Adanya pengaruh dari lingkungan keluarga
- Adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat

d. Penilaian siswa mengenai penyelenggaraan PEMILUKADA di daerahnya.

- Realisasi dari visi misi yang disampaikan
- Sikap dalam menangani permasalahan yang ada di daerah

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan dan menggambarkan mengenai:”Pandangan para siswa mengenai masalah dalam kegiatan PEMILUKADA.”

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman para siswa mengenai partisipasi politik.
2. Untuk mengetahui penilaian para siswa mengenai calon kepala daerahnya.
3. Untuk mengetahui sikap para siswa dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para siswa terhadap pola kampanye para calon kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan.
- b. Dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pihak – pihak terkait terutama pemerintah, sekolah dan lembaga yang terkait dalam masalah tingkat partisipasi politik di dalam pendidikan politik.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi diantaranya:

- a. Bagi penulis, menambah wawasan dan memperoleh pengalaman berfikir dalam memecahkan persoalan, khususnya mengenai masalah partisipasi dalam politik.
- b. Bagi pembaca, memperoleh pengetahuan mengenai permasalahan partisipasi politik.

E. Definisi Operasional

Ada pun definisi operasional yang ditetapkan yaitu:

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. (Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>)

George Boeree (2010: 97) mengemukakan bahwa persepsi mencakup “melihat, mendengar, menyentuh, tersenyum, merasakan posisi tulang sendi dan otot-otot, keseimbangan, suhu, sakit dan seterusnya.”

Sedangkan menurut Rivai dan Mulyadi (2011: 326):

Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangasangan dalam suatu pengalaman psikologi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi ini berkenaan mengenai proses individu untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu interaksi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat 1998: 55 dalam Damandiri, tersedia di <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>). Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Wilson (2000) dalam Damandiri (tersedia <http://www.damandiri.or.id /file /setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>) diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor eksternal atau dari luar :

- 1) Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang obyektif.
- 2) Novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk di persepsikan dibanding dengan hal-hal yang lama.
- 3) Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif di bandingkan dengan gerakan yang lambat.
- 4) Conditioned stimuli, stimuli yang di kondisikan seperti bel pintu, deringan telepon dan lain-lain.

b. Faktor internal atau dari dalam :

- 1) Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk berespon untuk istirahat.
- 2) Interest, hal-hal yang menarik lebih di perhatikan dari pada yang tidak menarik
- 3) Need, kebutuhan akan hal tertentu akan menjadi pusat perhatian.
- 4) Assumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain.

2. PARTISPASI POLITIK

Sudijono Sastroatmodjo (1995: 67) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Selain itu juga Budiardjo dalam Sastroatmodjo (1995: 32) mengartikan:

Partisipasi politik secara umum sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (public policy).

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Sastroatmodjo (1995: 35) sebagai berikut:

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga Negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

b. Partisipasi pasif

Dipihak lain partisipasi pasif, antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

3. PEMILUKADA

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. (Wikipedia, tersedia http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah)

Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. (Wikipedia, tersedia http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah" atau "Pemilukada". Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah)

Menurut Nonadhian (2011, tersedia di http://nonadhian.blogspot.com/2011/03/pengertian_dan_landasan_hukum_pilkada.html) ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

- a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam PP No. 5 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- c. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

4. KAMPANYE

Menurut Abdullah (2008: 198) dalam setiap kegiatan pemilihan, mau itu PEMILU Preseiden atau pun PEMILUKADA setiap calon berhak melakukan kampanye. Hal tersebut seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kampanye sendiri bertujuan untuk menarik perhatian dari pemilih sebanyak-banyaknya. Adapun yang menjadi metode yang dilakukan oleh peserta pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Petemuan terbatas;

- b. Tatap muka;
- c. Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyebaran kampanye kepada umum;
- e. Rapat umum; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

5. FIGUR KEPALA DAERAH

Figur menurut KBBI adalah sosok yang menjadi sorotan. Bila kita melihat hal tersebut dalam figur kepala daerah, yaitu tokoh sentral daerah yang menjadi pusat perhatian. Yang dimana setiap gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian. Untuk mejadi figur kepala daerah yang baik, seorang pemimpin haruslah mempunyai karakter dan kepribadian yang baik pula, karena hal tersebut merupakan fondasi bagi seorang pemimpin yang menjadi panutan semua orang.

Seperti yang dikatakan Robert P. Neuschel (2008: 37), yaitu bahawa:

Pemimpin memerlukan kekuatan karakter yang solid. Pilihan akan sulit, godaan banyak. Pembuatan keputusan sulit lebih membutuhkan kepribadian dan penilaian daripada kecerdasan.

Citra pemimpin bukan pada tampilan luar dirinya, melainkan lebih merupakan seluruh sistem nilai yang ditunjukkan terus-menerus. Ketika manifestasi ini jelas dan konsisten serta merefleksi suatu karakter integritas pribadi, citra ini menjadi instrument yang efektif. Integritas mengindikasikan bahwa seseorang telah terus-menerus mengembangkan suatu klasifikasi sistem nilai, sikap, dan tujuan yang konsisten.

Oleh karena itu figur dari seorang pemimpin seperti pemimpin daerah ini, tidak bisa dilihat dari segi luarnya atau penampilannya saja. Melainkan dari beberapa segi aspek, seperti kepribadian, karakteristik biogarafis, kemampuan, dan pengalaman. Selain itu juga yang terpenting dari figur pemimpin yaitu cara seorang pemimpin bisa memimpin anggota-anggotanya. Karena dari cara dia memimpin lah kita bisa melihat apakah dia layak diaktakan sebagai seorang pemimpin atau pun tidak. Kaitannya dalam masalah ini kita bisa mengetahui apakah kepala daerah tersebut bisa dijadikan figur atau tidak. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu pemimpin dan bagaimana mereka itu memimpin.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini berjudul “Persepsi Siswa SMA Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, berisi lima bab, yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Kesimpulan dan Saran. Bab I Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Struktur Organisasi Skripsi.

Bab II berisi Landasan Teori, yang secara garis besar mengkaji tentang persepsi, pemilu, pemilukada, kampanye, dan figur pemimpin. Bab III membahas metode dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, prosedur penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas.

Bab IV menguraikan Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana penilaian siswa mengenai figur calon Wali Kota Cimahi pada saat pemilihan? 2. Bagaimana penilaian siswa terhadap Wali Kota Cimahi yang terpilih? 3. Bagaimana persepsi siswa mengenai pelaksanaan kampanye PEMILUKADA Kota Cimahi? 4. Bagaimana pemahaman siswa dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung di Kota Cimahi? 5. Apa harapan siswa mengenai penyelenggaraan PEMILUKADA Kota Cimahi? Dan Bab V diuraikan Kesimpulan dan Saran.